



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor 4, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/11/2024
Reviewed : 04/12/2024
Accepted : 11/12/2024
Published : 27/12/2024

Tawarika M Pandiangan¹
Windawati Pinem²
Alissa P Simbolon³
Samuel Sihite⁴
Mantasia Hasibuan⁵
Rahmi Siregar⁶
Rian TR Simanjuntak⁷

PEMBEKALAN PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP SISWA SMA NEGERI 18 MEDAN MENJADI PEMILIH RASIONAL MENJELANG PILKADA 2024

Abstrak

Menjelang pilkada turut memunculkan upaya kampanye yang disemarakkan melalui media sosial, pendekatan langsung terhadap masyarakat dan lain sebagainya. Kekhawatiran terhadap siswa yang berstatus sebagai pemilih pemula bahwa belum matang dalam pengalaman politik termasuk pembinaan pendidikan politik akan berdampak pada perilaku memilih tindak mengandalkan rasionalitas yang baik memilih calon. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas dengan keterlibatan peneliti langsung untuk memberi rangkaian pembinaan pendidikan politik kepada siswa di SMA Negeri 18 Medan. Tujuan penelitian ini dilakukan agar menghasilkan siswa menjadi pemilih rasional dalam Pilkada 2024. Siswa dapat memilih dengan nalar yang baik dan tidak mudah terbuai dengan pencitraan politik semata, pembohongan hingga terlibat dalam konflik politik. Siswa dapat memahami etika politik yang benar maka keputusan memilih calon di Pilkada 2024 menjadi jalan terbaik.

Kata Kunci : Pemilih Rasional, Pendidikan Politik, Pilkada 2024

Abstract

Ahead of the regional elections, campaign efforts were enlivened through social media, direct approaches to the community and so on. Concerns about students who have the status of novice voters that they are not mature in political experience, including fostering political education, will have an impact on their behavior of choosing an action relying on good rationality to choose candidates. Therefore, this study uses a classroom action research method with the involvement of direct researchers to provide a series of political education coaching to students at SMA Negeri 18 Medan. The purpose of this research is to produce students to become rational voters in the 2024 Regional Elections. Students can choose with good reasoning and are not easily lulled by mere political imagery, lies to get involved in political conflicts. Students can understand the correct political ethics, so the decision to choose candidates in the 2024 Regional Elections is the best way.

Keywords: Rational Voters, Political Education, 2024 Regional Elections.

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah rangkaian kegiatan pemilihan calon kandidat penguasa yang ditentukan dari suara rakyat, pemilihan ini terjadi 5 tahun sekali. Pilkada sebagai sarana pemberian mandat dan legitimasi dari rakyat kepada Kepala Daerah dengan harapan Kepala Daerah yang terpilih dapat memperjuangkan kepentingan rakyat. Negara Indonesia sebagai penganut demokrasi bahwa Pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur bahwa demokrasi telah dilaksanakan ketika mengikuti Pemilu / Pilkada saja. Praktik demokrasi ini cenderung oligarki karena prosedur teknik elektoral memungkinkan terjadinya status quo. Pemilu layaknya mempertandingkan jumlah konsensus suara rakyat, utilitasnya tidak diukur dari ambisi etisnya “ Dari rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat ” sebab melihat pelanggaran etis berpolitik, seperti maraknya politik uang, memilih karena terdapat kesamaan identitas saja, politik dinasti, kampanye politik yang menyesatkan. (Sutrisno, 2017:36).

^{1,2,3,4,5,6,7} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan
 Email : pandiangantawarika@gmail.com, windawatipinem@unimed.ac.id

Menaruh kekhawatiran terhadap masyarakat dengan lemahnya pembekalan pendidikan politik maka mudah saja masyarakat terjebak dalam kekejaman pelaku politik terhadap demokrasi. Pendidikan politik sebagai usaha sadar dan terencana untuk menjadikan setiap orang menjadi cerdas dalam hal menganalisis, mengevaluasi situasi perpolitikan dengan tujuan membina pengetahuan, sikap dan keterampilan politik masyarakat. (Setiyono et al., 2024). Pelaksanaan pemilu tanpa pendidikan politik sama hal adanya upaya pembodohan masyarakat awam tanpa menggunakan cara berpikir kritis menanggapi dampak kehidupan politik yang terjadi melibatkan peran masyarakat termasuk terhadap generasi muda. Dikutip dalam situs ugm.co.id, seorang Pakar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, oleh Dr. Mada Sukmajati para pemilih dari generasi muda cenderung berubah dan suka konten politik ringan. (Grehenson, 2023)

Pemilih pemula belum memiliki pengalaman sebelumnya dalam mengikuti pencoblosan dan kali pertamanya diberi kesempatan memilih dan saat itu juga menggejolak emosi lebih dari anak muda yang didominasi perilaku anak muda cenderung sentimen dan terprovokasi serta menyukai terciptanya onarona politik misalnya di penyebaran hoax untuk menyudutkan buruknya performa calon maupun aktivis atau pegiat politik lainnya di Media Sosial karena isu ini dianggap sebagai lelucon yang disebarkan bukan keseriusan yang harus diperhatikan. Kampanye politik buta bahkan digemakan oleh anak muda dengan anggapan bahwa dengan mengikuti kampanye adalah lazim dan menguntungkan yang tidak bisa dilepaskan tanpa memaknai maksud dari demokrasi sejatinya. (Aminah, A., & Sari, N, 2019:51).

Penelitian yang dilakukan oleh Ma'aruf, A. R. S., & Putra, D. K. S. (2019:1) berjudul “Efektivitas Penggunaan Media Sosial Instagram Terhadap Personal Branding Joko Widodo Pada Pemilih Pemula Pemilu 2019” mengangkat fenomena bahwa pemilih pemula ditemukan mengalami kesulitan atau bingung dalam menentukan pilihannya karena anak muda belum siap dan mampu untuk berkecimbung mengamati kehidupan politik. Faktor tersebut terjadi karena fokus materi pembelajaran dari satuan pendidikan sekolah tidak membuka ruang untuk mengkaji hal semacam ini atau pola asuh dari keluarga tidak menaruh perhatian untuk mendidik anak harus paham dengan politik, sehingga miskinnya pemahaman pemilih pemula untuk memilih karena cenderung sengaja atau tidak sengaja mengabaikan peran kajian ilmu politik. Dapat saja pemilih pemula mencoblos dengan mengasal tanpa pertimbangan secara kritis dan memberi alasan yang logis mengapa memilih calon tersebut.

Mengurangi dampak bias politik yang terjadi dari pemilih pemula, perlu dilakukan usaha sadar dan terencana membangun pengetahuan dan pemahaman terhadap generasi muda bahwa menjadi pemilih rasional adalah kebutuhan untuk mendeklarasikan pelaksanaan pemilu / pilkada dengan mematuhi etika, nilai, moral dan norma yang berlaku. (Simanjuntak, N. Y, 2017). Dari ketiga pendekatan perilaku memilih, yakni sosiologi, psikologi yang menjadi pilihan terbaik untuk diperkenalkan adalah menjadi pemilih dengan pendekatan rasional. Pemilih rasional sangat eksis untuk diangkat menjadi topik perbincangan hangat di tahun politik, sebab perilaku pemilih rasional ini sangat bergantung pada nalar yang baik untuk memutuskan mana yang baik dan buruk, khususnya dalam memilih serta seseorang ini selalu menggunakan pisau analisisnya membedah kebenaran yang valid mengusut tuntas dibalik seorang calon kandidat butuh penelitian, inilah prinsip seorang pemilih rasional.

Dari fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, menjadi alasan logis dilakukannya penelitian ini dengan mengangkat judul “Pembekalan Pendidikan Politik Terhadap Siswa SMA Negeri 18 Medan Menjadi Pemilih Rasional ” dengan menggunakan metode penelitian tindakan kelas terhadap siswa di kelas XII IPS 2. Proses penelitian dilakukan dengan pengadaan penjelasan materi, pengerjaan soal pre-test dan post-test oleh siswa dan sesi tanya jawab. Penelitian ini bertujuan untuk memberi pembekalan pendidikan politik terhadap siswa untuk menjadi Pemilih Rasional menjelang Pilkada 2024.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang berorientasi pada kegiatan pembelajaran yang melibatkan peneliti sendiri menjadi pengajar pada subjek peneliti yakni siswa dan penelitian ini dilakukan di dalam ruang kelas bersifat eksperimen berkesinambungan karena diawali dengan perencanaan dengan adanya perlakuan pemberian materi ajar, pada subjek penelitian hingga evaluasi hasil yang

dicapai sesudah perlakuan. (Rahman, T., & Pd, M, 2018). PTK ini dapat menggunakan data kuantitatif untuk melengkapi data yang diperoleh melalui analisis kualitatif, hal ini diterapkan pada penunjukkan hasil rata-rata post-test siswa.

Prosedur dari penggunaan metode ini yakni pengerjaan soal pre-test pada siswa untuk mengukur kemampuan awal siswa mengenai pentingnya pembekalan pendidikan politik terhadap siswa untuk menjadi pemilih rasional sebelum materi diajarkan kepada siswa, selanjutnya mengajarkan materi ajar seiring adanya sesi tanya jawab. Terakhir, pengerjaan soal post-test oleh siswa untuk mengukur hasil yang dicapai sesudah pendidikan politik diajarkan oleh peneliti untuk siswa. Penelitian ini diperkuat dengan studi literatur, yakni memanfaatkan buku, jurnal, tulisan ilmiah lainnya yang kredibel dan akurat dalam memperkuat data penelitian ini. Dilengkapi dengan bukti dokumentasi berupa video selama proses pendidikan politik berlangsung dilakukan di kelas XII IPS 2 SMA Negeri 18 Medan yang sebagian besar siswanya menjadi pemilih pemula.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berangkat dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa suasana belajar dapat terkondisikan dengan baik dan tertib. Siswa dengan antusias mengikuti pembinaan pendidikan politik dengan seksama. Sebelum peneliti akan melangsungkan pengajaran materi, peneliti melakukan pre-test secara tanya jawab dan dapat dijawab oleh seluruh siswa. Dari hasil pre-test menunjukkan bahwa seluruh siswa kelas XII IPS 2 belum mengetahui makna dan urgensi pendidikan politik dan sedikitnya siswa memberikan jawaban bentuk pengadaan pendidikan politik yang telah ditemukan yakni semacam sosialisasi politik di lingkungan masyarakat. Selain itu, peneliti memberikan pertanyaan untuk mengetahui apakah siswa pernah mendengar pemilih rasional dan hasil menunjukkan seluruh siswa tidak pernah mendengar istilah pemilih rasional. Dari hasil post-test dengan lima pertanyaan yang diberikan melalui lembar tes, menggunakan perhitungan rata-rata (mean) menunjukkan hasil :

Perhitungan untuk mencari rata-rata (mean) nilai post-test

| X | F | F.X |
|------------|----|-------|
| 10 | 1 | 10 |
| 60 | 3 | 180 |
| 80 | 11 | 880 |
| 100 | 13 | 1.300 |
| Jumlah | 28 | 2370 |
| Nilai mean | 85 | |

Dari hasil post-test yang telah dikerjakan oleh siswa kelas XII IPS 2 berjumlah 28 siswa, menunjukkan hasil rata-rata dengan skor 85 yang termasuk ambang baik. Dari hasil tersebut menunjukkan peningkatan jauh lebih baik dari hasil pre-test yang mulanya seluruh siswa belum mengetahui dan memahami urgensi dan tujuan pendidikan politik khususnya bagi generasi muda untuk menjadi pemilih rasional menjelang Pilkada 2024, namun setelah peneliti melakukan transfer pengetahuan dan pemahaman materi dan sesi tanya jawab pada kegiatan inti PTK dengan siswa telah memberi efek manjur pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa bahwa keberadaan pendidikan politik sangat penting agar menjadikan diri siswa dapat menjadi pemilih rasional dalam Pilkada 2024 nanti.

Pembahasan

1. Urgensi Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda

Dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat dengan tegas menyatakan diantaranya salah satu tujuan nasional yang harus dicapai adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, negara melarang keras tercemarnya pembodohan secara kognitif, afektif dan psikomotor oleh masyarakat. Ambisi negara untuk memenuhi janji melalui peraturan ini dengan bersedia

mendukung kelajuan pergerakan urgensi pendidikan politik untuk diberikan kepada seluruh masyarakat termasuk generasi muda. Pembekalan pendidikan politik termasuk pada agenda yang wajib diprogramkan, hal ini dinyatakan dalam Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1982 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Politik Generasi Muda bahwa pendidikan politik adalah usaha sadar dan terencana untuk membangun potensi kesadaran dan partisipasi politik pada generasi muda guna mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 diselaraskan menjadi budaya politik.

Sebagaimana menurut pandangan Soerono (dalam Naning, 1982:8) mengemukakan bahwa pendidikan politik adalah usaha memasyarakatkan politik dan mencerdaskan kehidupan politik bagi bangsa untuk menyadari akan hak dan kewajiban serta mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang benar demi kebaikan bersama. Menurut M. Nur Khoiri, dkk (1994:5) bahwa pendidikan politik sangat penting diberikan agar masyarakat dapat memahami permasalahan atau fenomena sosial turut menjadi bagian dari kajian politik dan memantapkan masyarakat dalam pengambilan keputusan bahwa konsep teori ini memberikan efek pada pembinaan pendidikan politik yang diadakan secara langsung terhadap siswa kelas XII IPS 12 yang mulanya tidak mengetahui sama sekali urgensi pendidikan politik, hal ini menjadi peringatan berbahaya sebab jika tidak ada pemberlakuan pendidikan politik baik dilakukan secara internal maupun pembinaan eksternal termasuk perlakuan peneliti melakukan PTK terhadap siswa, maka berdampak pada lemahnya kontribusi generasi muda menyikapi secara bijaksana situasi politik yang akan dihadapi pada hidupnya, termasuk dalam menggunakan hak pilihnya akan cenderung tidak rasional dalam memilih calon menjelang Pilkada 2024.

Sebagaimana disampaikan secara daring oleh anggota KPU bernama August Mellaz yang menjadi narasumber pada webinar kebangsaan bertemakan “ Memilih Pemimpin Ideal untuk Masa Depan Bangsa, Hak Pilihku Harus digunakan sebaik-baiknya ” yang digelar Forum Osis Nasional (FON), Jum’at (23/06/2023) mengemukakan bahwa pemilih yang berasal dari generasi Z dan milenial diperkirakan terdapat 55%. Artinya, urgensi pendidikan politik bagi generasi muda wajib diterapkan agar dominasi suara oleh generasi muda dapat memberi jalan terbaik membawa bangsa Indonesia semakin baik. Dikhawatirkan, jika pendidikan politik masih dianggap tabu oleh generasi muda maka dipastikan perilaku memilih cenderung terperangkap dalam etika politik kotor, seperti menghalalkan adanya praktik politik uang hingga penyalahgunaan hak pilih.

2. Kiat menjadi Pemilih Rasional

Perilaku pemilih dengan pendekatan rasional adalah kecenderungan perilaku memilih ini dalam menentukan pilihannya perlu mempertimbangkan dan mengusut kebenaran baik orientasi calon hingga menganalisis visi dan misi yang dimiliki calon apakah memberi dampak baik dan berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat. Intinya dalam memilih calon, perilaku pemilih ini cenderung mengutamakan nalar kritis yang baik untuk menentukan siapa bakal calon yang terbaik untuk dipilih. Keistimewaan perilaku pemilih rasional ini sangat dibutuhkan demi memperbaiki kerusakan demokrasi yang terjadi akibat ulah suatu para calon penguasa dengan melibatkan oknum lainnya melakukan pelanggaran etika politik, sehingga ambisi etis dari demokrasi “ dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ” tidak sepadan dengan kenyataan yang terjadi. Penyelenggaraan pemilu maupun pilkada tidak dapat dinyatakan sebagai tolok ukur demokrasi karena masalah etika politik masih terjadi akibat lemahnya pendidikan politik.

Suara rakyat diperoleh dari cara yang salah dan licik memberi kritik terhadap penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada hanyalah menciptakan keonaran publik bukan membangun demokrasi. Maka dari itu, agar penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada dapat diisi dengan suara dari hasil kemampuan secara rasional, untuk senantiasa komitmen khususnya pihak Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu menjadikan masyarakat menjadi pemilih rasional termasuk pada sebagian besar generasi muda pemilih pemula yang belum memiliki pengalaman dan kemampuan dalam memutuskan pilihan yang terbaik, agar sejak dini ditanamkan pendidikan politik sebagai pembekalan menjadi pemilih rasional. Adapun kiat yang dapat dilakukan untuk menjadi pemilih rasional, sebagai berikut :

1. Memegang prinsip dalam hidup bahwa kejujuran adalah hal yang sangat penting. Pemilih rasional adalah pemilih jujur karena pengambilan keputusan untuk memilih calon murni atas perintah nalar kritis bukan terlibat dalam pembelian suara.

2. Menekuni pendidikan politik, baik melalui tingkat literasi yang baik menemukan isu kajian politik atau segala pengetahuan dan wawasan mengenai politik hingga keikutsertaan dalam sosialisasi, pembinaan, edukasi atau sebuah komunitas. Pendidikan politik dapat diakses secara manual baik buku cetak, atau karya tulis cetak lainnya serta dapat diakses melalui situs internet dan media sosial.

SIMPULAN

Fenomena lemahnya pendidikan politik generasi muda tidak dapat dipungkiri telah banyak ditemukan oleh banyak penelitian. Hal ini berdampak pada kecerdasan generasi muda lemah dalam menanggapi isu politik ketika itu akan menghadapinya kelak termasuk penyalahgunaan hak pilih. Dari hasil PTK yang dilakukan di kelas XII IPS 12 sekolah SMA Negeri 18 Medan dapat disimpulkan bahwa siswa kelas tersebut belum mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai urgensi dan tujuan pendidikan politik khususnya menjadikan siswa kelak menjadi pemilih pemula yang rasional, maka setelah dilakukan perlakuan kegiatan pembinaan memberi efek yang manjur dibuktikan dengan perolehan rata-rata skor masuk pada ambang aman. Membentuk pemilih rasional, seharusnya menjadi komitmen bangsa, negara dan masyarakat untuk mendukung keberadaan pendidikan politik baik dilakukan atas inisiatif mahasiswa, kaum akademisi lainnya, aktivis politik hingga saatnya satuan pendidikan di sekolah, khususnya guru mata pelajaran PPKn menyediakan program pendidikan politik dapat diselenggarakan dalam kegiatan pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, A., & Sari, N. (2019). Dampak hoax di media sosial Facebook terhadap pemilih pemula. *Jurnal Komunikasi Global*, 8(1), 51-61.
- Grenhenson, G. (30 Nov 2023). Pemilih Muda Cenderung Mudah Berubah dan Suka Konten Politik Ringan. Diakses pada tanggal 25 September 2024. Link situs ugm.com.id : <https://ugm.ac.id/id/berita/pemilih-mudacenderung-mudah-berubah-dan-suka-konten-politik-ringan/>
- Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1982 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Politik Generasi Muda.
- Khoiron, M. Nur, dkk. 1999. Pendidikan Politik bagi Warga Negara (Tawaran Operasional dan Kerangka Kerja). Yogyakarta : LKIS.
- Ma'aruf, A. R. S., & Putra, D. K. S. (2019). Efektivitas Penggunaan Media Sosial Instagram Terhadap Personal Branding Joko Widodo Pada Pemilih Pemula Pemilu 2019. *Jurnal Ilmu Komunikasi Acta Diurna*, 15(2), 1-18.
- Rahman, T., & Pd, M. (2018). Aplikasi model-model pembelajaran dalam penelitian tindakan kelas. CV. Pilar Nusantara.
- Setiyono, B., Adnan, M., & Astrika, L. (2024). Gerakan Anti Korupsi: Perbandingan antara Korea Selatan dan Indonesia. *Nuansa Cendekia*.
- Simanjuntak, N. Y. (2017). Pemantauan dalam proses penyelenggaraan pemilu. *Jurnal Bawaslu*, 3(3), 2443-2539.
- Soerono, L. 1982. " Pendidikan Politik dan Upaya Melestarikan Nilai dan Kepemimpinan 45 pada Sasa Warsa 60-an". Dalam Naning, Ramdlon. 1982. Pendidikan Politik dan Regenerasi. Yogyakarta: Liberty.
- Surbakti, Ramlan. 1999. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Sutrisno, C. (2017). Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 2(2), 36-48.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.